

WORKSHOP DARING PERSIAPAN UJI KOMPETENSI PROFESI HUMAS BERTARAF NASIONAL

Muhammad Adi Pribadi¹, Ilhan Noor Hafizh Adijaya², Bianca Michelle William³ & Bella Putri Wijaya⁴

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: adip@fikom.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: ilhan.915230131@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: bianca.915230171@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: bella.915230089@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The Community Service (PKM) program aims to provide participants with an understanding of the necessary preparations before taking the Public Relations (PR) competency test, held by LSPPRI on behalf of the National Professional Certification Agency (BNSP). This PKM theme is crucial as part of efforts to assist the government in encouraging individuals with work skills to obtain professional certification from BNSP. The Untar PKM activity is an important part of encouraging public relations professionals to obtain a Public Relations professional certificate. The workshop participants were public relations personnel from several State-Owned Enterprises (BUMN), who registered themselves through the State-Owned Enterprise Public Relations Forum (FH BUMN), to take the PR competency test at LSPPRI. As a Professional Certification Institution (LSP), LSPPRI has obtained permission from the National Professional Certification Agency (BNSP) to conduct competency tests, issue PR professional certificates, and create competency test materials on behalf of BNSP. The PKM Chairperson plays a role in providing education regarding the PR competency test implementation process, determining the appropriate scheme, and portfolio preparation strategies. The PKM implementation methodology is through online counseling, where the PKM Chair delivers the material to the participants, using a PPT via Zoom. After an hour of presentation, the participants are given the freedom to ask questions after the material is presented to them, then the speaker answers questions from prospective competency test participants. This kind of teaching method will make it easier for prospective assessors to digest the material they have received, thereby increasing their chances of getting a K grade in the competency test.

Keywords; professional certificate, competency test, certification scheme, online training

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengikuti uji kompetensi *Public Relations* (PR) yang diselenggarakan oleh LSPPRI atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). PKM dengan tema ini penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah dalam mendorong Masyarakat yang memiliki keterampilan bekerja untuk mendapatkan sertifikat profesi dari BNSP. Kegiatan PKM Untar menjadi bagian penting untuk mendorong para profesi humas untuk memiliki sertifikat profesi Humas. Para peserta workshop adalah personil humas dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mendaftarkan diri mereka melalui Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN), untuk mengikuti uji kompetensi PR di LSPPRI. Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), LSPPRI mendapatkan ijin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyelenggarakan uji kompetensi, membuat sertifikat profesi PR dan membuat materi uji kompetensi atas nama BNSP. Ketua Pelaksana PKM berperan untuk memberikan edukasi terkait proses pelaksanaan uji kompetensi PR, menentukan skema yang tepat, dan strategi penyusunan portofolio. Metodologi pelaksanaan PKM adalah dengan menyampaikan penyuluhan secara daring, dimana ketua PKM menyampaikan materi kepada para peserta, menggunakan ppt melalui media zoom. Setelah satu jam presentasi, para peserta diberikan keleluasaan untuk bertanya setelah materi disampaikan kepada mereka kemudian Pemateri menjawab pertanyaan dari para calon peserta uji kompetensi. Metode pengajaran seperti ini akan memberikan kemudahan bagi calon asesi untuk mencerna materi yang telah diterimanya sehingga memperbesar kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan nilai K dalam uji kompetensi.

Kata kunci; sertifikat profesi, uji kompetensi, Skema Sertifikasi, Pelatihan Berbasis Daring



1. PENDAHULUAN

Humas di era digital menjadi profesi yang di butuhkan oleh Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga negara karena institusi menghadapi keluar masuk informasi yang begitu banyak, yang berasal dari dalam institusi dan luar. Kondisi menjadi lebih rumit ketika masyarakat Indonesia yang masih memiliki literasi digital yang rendah sehingga mereka mudah untuk menjadi marah dan reaktif dari isu yang berkembang. Disisi lain mereka mudah percaya informasi salah dan menyebarkannya di jejaring komunikasinya. situasi seperti ini memperbesar kemungkinan institusi menghadapi krisis komunikasi sehingga diperlukan personil humas yang kompeten.

Personil humas yang kompeten adalah mereka yang berpengetahuan, terampil dan memiliki sikap yang profesional dalam membantu institusinya untuk mengelola informasi sehingga reputasi institusi di Masyarakat dapat terjaga. Profesional humas yang memiliki kompetensi yang sesuai adalah dengan memiliki sertifikat kompetensi di bidang humas atau *Public Relations* (PR) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat presiden di tahun 2018 memberikan arahan kepada para Menteri yang hadir untuk ikut mendorong Masyarakat dalam memperoleh sertifikat profesi dari BNSP (Sani, 2018). Jokowi mengharapakan pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah pemegang sertifikat profesi ini. Harapan itu memang tercapai karena sejak tahun 2019, jumlah peserta meningkat setiap tahunnya. Hal ini diawali dengan terlibat secara langsung Jokowi dalam membagikan sertifikat profesi kepada para asesi dalam beberapa kesempatan. Disisi lain, para Menteri mendorong pegawainya untuk memiliki sertifikat profesi. Sedangkan lembaga-lembaga yang ada di bawah Kementerian seperti Kementerian BUMN yang membawahi BUMN mendorong pegawai kementeriannya dan pegawai BUMN untuk mengambil uji kompetensi.

Para profesional humas bisa memperoleh sertifikat profesi humas dari BNSP dengan mengikuti uji kompetensi PR yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia (LSPPRI). LSPPRI adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi BNSP sebagai penyelenggara uji kompetensi PR dan menerbitkan sertifikat profesi PR atas nama BNSP. LSPPRI adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyelenggarakan uji kompetensi profesi Humas/PR (Public Relations) atas nama BNSP. LSPPRI berdiri pada tahun 2012 dengan mengantongi akte notaris No. 18 tahun 2012. LSPPRI adalah lembaga yang di akui sebagai LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang berada dalam naungan BNSP, tercantum dalam surat keputusan BNSP dalam lisensi nomer Kep 2258/BNSP/X/2023. Lisensi yang diberikan oleh BNSP untuk LSP harus di perbaharui setiap tiga tahun sekali. LSPPRI dalam pendiriannya didukung oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Perhumas (Persatuan Hubungan Masyarakat), BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat), dan APPRI (Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia).

LSPPRI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan uji kompetensi PR atas nama BNSP. Memperbaharui dan mengembangkan skema dan unit kompetensinya, merubah materi uji kompetensi, menentukan tempat uji kompetensi, menerbitkan sertifikat profesi atas nama BNSP, dan mencabut sertifikat dari pemegang sertifikat apabila melanggar norma.

LSPPRI mengadakan bimbingan teknis (*workshop*) kepada para asesi dari FH BUMN (Forum Humas Badan Usaha Milik Negara), Pada tanggal 31 Januari 2025. Mereka akan mengikuti uji kompetensi PR pada tanggal 13 Februari 2025. Permasalahan LSPPRI adalah tidak banyak asesor yang memiliki kesempatan untuk menjadi mentor karena mereka juga memiliki pekerjaan lain,



selain asesor sehingga LSPPRI mengundang ketua PKM untuk menjadi mentor agar bisa membimbing para calon peserta uji kompetensi (asesi) karena ketua PKM memiliki pengalaman yang banyak menjadi asesor sehingga mereka bisa menjadi narasumber dalam persiapan uji kompetensi PR untuk para peserta.

Ketua PKM telah membantu LSPPRI dalam beberapa kegiatan *workshop* bagi para calon peserta uji kompetensi. Informasi yang diperoleh dari LSPPRI, Peserta yang pernah mengikuti *workshop* bersama ketua PKM sebagian besar sukses mendapatkan nilai K (Kompeten) dari para asesor. Walaupun ada asesi mendapatkan nilai BK (Belum Kompeten), tapi jumlahnya sedikit sekali. Hal ini menjadi catatan sendiri bagi LSPPRI, bahwa ketua PKM berhasil dalam mempersiapkan asesi untuk mengikuti uji kompetensi PR.

Proses penyampaian informasi yang akan dilakukan oleh tim PKM Untar mengedepankan interaksi simbolik kepada para peserta, agar mereka dapat memahami informasi yang disampaikan. Interaksi simbolik adalah teori yang disampaikan oleh George Herbert Mead, yang menjelaskan cara berkomunikasi agar terjadinya kerjasama (Halim dan Pribadi (2024)).

Konsep interaksi simbolik terdiri dari *mind* (pikiran), *self* (diri) dan *society* (masyarakat). Pikiran adalah kemampuan seseorang berkomunikasi untuk menggunakan simbol-simbol komunikasi yang sesuai agar tercapainya saling pengertian (Sukendro dan Natalia (2024); Puspitasari dan Azeharie (2019)). Tim PKM Untar berinteraksi dengan pimpinan LSPPRI terkait kebutuhan informasi yang perlu disampaikan dalam *workshop*. Pada saat kegiatan *workshop*, ketua tim berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia agar para calon peserta uji kompetensi (calon asesi), mengerti isi pesan yang diterimanya.

Diri adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya seperti orang yang diajak bicara, untuk mencapai pengertian (Hardianto dan Pribadi (2024); Martin dan Pribadi (2023); Sugiarto dan Pribadi (2022)). Ketua Tim selama proses komunikasi dengan pimpinan LSPPRI akan selalu memosisikan dirinya seperti pimpinan LSPPRI, untuk bisa memiliki empati, mendengar dengan baik, mencatat informasi atau membuat notulen yang disampaikan memahami untuk mengetahui kebutuhan informasi selama proses pembuatan materi ppt. Sedangkan pada peserta bimbingan teknis, Ketua tim selaku pemateri memberikan ruang tanya jawab setelah materi diberikan, selama proses tanya jawab, pemateri mendengarkan dengan baik terkait masalah mereka sehingga pemateri bisa memberikan kebutuhan informasi dari peserta

Society (Masyarakat) adalah terjadi kesepakatan kerjasama diantara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan berdasarkan aturan yang berlaku. *Society* terbagi menjadi dua, *generalized others* dan *particular others*. *Generalized other* adalah kondisi dimana aturan dibuat oleh beberapa orang, dimana aturan yang dibuat harus di jalani oleh anggota di dalam kelompok. *Particular others* adalah aturan di buat oleh satu orang didalam kelompok dimana anggota didalam kelompok harus patuh pada aturan tersebut agar terjadi kerjasama (Christofer dan Pribadi (2021); Stevanny dan Pribadi (2020); Silenzie dan Pribadi (2020)). Dalam kegiatan PKM, ketua PKM sebagai pemateri dalam kegiatan *workshop* mengatur informasi selama proses interaksi berlangsung, agar informasi lancar, mencapai tujuan dalam waktu yang terbatas. Pemateri menjadi *particular other* dalam konteks ini. Misalnya, pemateri menyampaikan informasi kepada calon asesi dimana momen ketua peneliti bicara yang lain harus diam mendengarkan.

PKM yang dilaksanakan oleh Tim Untar terkait dengan tema unggulan dari RIP Fikom Untar. RIP Fikom Untar memiliki isu strategis terkait merebaknya berbagai masalah komunikasi di dalam



masyarakat Informasi, Sedangkan, konsep pemikirannya adalah implementasi komunikasi yang berkualitas dalam masyarakat Informasi. Pemecahan masalah adalah dengan memperkuat Kualitas Komunikasi Masyarakat Informasi. Topik yang sesuai dengan kegiatan PKM adalah terkait komunikasi dalam Perspektif Multidisipliner.

Kegiatan PKM dilaksanakan mengacu pada RIP sehingga kegiatan memberi manfaat pada Masyarakat. Kegiatan PKM sebagai pembicara dalam kegiatan *workshop* persiapan uji kompetensi, sesuai dengan RIP Fikom Utara. Permasalahan yang dihadapi oleh Humas di Indonesia adalah mereka belum banyak tahu terkait sertifikat profesi Humas dari BNSP dan cara memperolehnya. Keberadaan Tim PKM Utara memberikan informasi yang berkualitas terkait keberadaan sertifikat profesi Humas yang diakui oleh negara dan cara memperoleh sertifikatnya sehingga mereka bisa memperoleh sertifikatnya.

Workshop menjadi suatu kegiatan yang sering dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan uji kompetensi profesi dilakukan. Kegiatan ini ditujukan agar para calon peserta uji kompetensi (asesi) mendapatkan informasi yang cukup tentang pelaksanaan uji kompetensi profesi. Melalui kegiatan *workshop*, calon asesi memperoleh informasi untuk mempersiapkan dirinya terkait kegiatan uji kompetensi (Slamet (2021); Rianto (2023); Prasetyo (2023)).

2. METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan PKM untuk membantu LSPPRI terdiri dari koordinasi interaksi, penyesuaian materi, persetujuan materi, pemaparan dan tanya jawab. Sebelum pelaksanaan *workshop* pada tanggal 31 Januari 2025. Tahapan pelaksanaan PKM dimulai dari koordinasi interaksi, penyesuaian materi, kesepakatan materi, pemaparan, dan tanya jawab. Koordinasi interaksi adalah kondisi dimana Tim PKM Utara melakukan komunikasi dengan pimpinan LSPPRI, untuk mengetahui Gambaran umum kegiatan *workshop*, siapa para pesertanya dan tanggal pelaksanaannya. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, saat interaksi melalui telepon whatsapp untuk mempermudah dalam penyampaian pesan, penerimaan informasi, dan interpretasi makna. Pimpinan LSPPRI menjelaskan bahwa pelaksanaan *workshop* diharapkan mampu memberikan panduan bagi calon asesi dalam menyusun portofolio. Para peserta adalah para profesional PR yang terhimpun dalam Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN).

Penyesuaian materi

Materi yang telah dibuat oleh ketua PKM perlu di padankan dengan keinginan pimpinan LSPPRI. Ketua PKM menyerahkan materi untuk kegiatan *workshop* kepada Muslim Basya selaku pimpinan LSPPRI, agar materi yang disampaikan sesuai dengan keinginannya. Materi yang dibuat oleh tim PKM Utara berdasarkan materi yang pernah dibuat oleh LSPPRI. Namun beberapa isi materi sedikit dikembangkan tim PKM untuk memudahkan calon asesi dalam menerima isi pesan dalam *workshop*.

Persetujuan materi

Materi yang telah dikembangkan oleh tim PKM dikirimkan melalui *whatsapp* untuk dipelajari kembali oleh Pimpinan LSPPRI. Ketika materi yang akan disampaikan dianggap sudah sesuai dengan keinginannya, materi sudah bisa disampaikan kepada peserta *workshop*. Tahapan pemaparan adalah materi yang disampaikan dalam kegiatan *workshop* yang disampaikan kepada peserta yang dilaksanakan secara daring menggunakan zoom.



Tanya jawab

Kondisi dimana pemateri memberikan kesempatan kepada calon asesi untuk memberikan pertanyaan. Ruang bertanya diberikan kepada peserta, agar mereka bisa mengungkapkan permasalahan pemahaman terkait materi *workshop*. kondisi jaringan internet bisa menjadi kendala teknis bagi mereka untuk memahami isi materi sehingga ruang bertanya bisa menjadi sarana untuk membuat peserta memahami materi yang disampaikan.

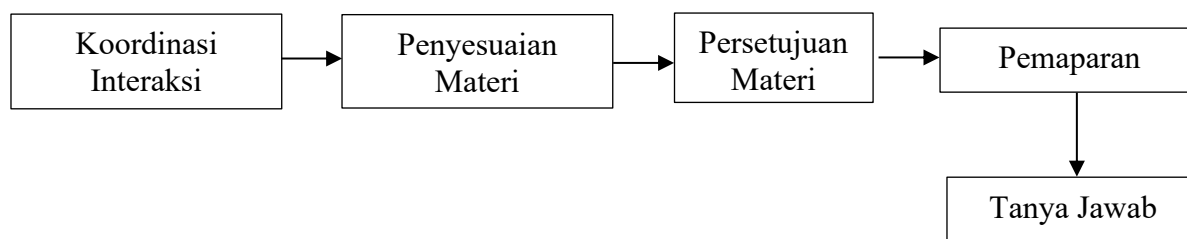
Pengukuran keberhasilan *workshop*

Ditentukan oleh dua faktor yaitu pemahaman isi materi yang dibuktikan dalam tanya jawab dan tingkat keberhasilan peserta dalam uji kompetensi PR yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025. Pemahaman isi materi oleh peserta dalam bentuk tanya jawab menjadi bagian pertama evaluasi untuk pengukuran bahwa kegiatan *workshop* dianggap sukses atau tidak. Ketika peserta bertanya, kemudian mendapatkan jawaban dari pemateri, lalu mereka menyatakan paham atas penjelasan yang diberikan maka mereka dianggap mengerti. Ketika peserta yang lain tidak ada lagi yang bertanya terkait materi maka tim PKM menyimpulkan bahwa mereka telah mengerti materi persiapan uji kompetensinya sehingga mereka siap untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi.

Bagian kedua dari evaluasi adalah hasil peserta *workshop* yang mendapatkan nilai K (Kompeten) dalam uji kompetensi PR, 13 Februari 2025, mencapai 95 persen. Pengalaman ketua PKM saat menjadi asesor uji kompetensi PR pernah memberikan nilai BK (Belum Kompeten) kepada salah satu asesi, akibat tidak mengikuti kegiatan *workshop* dengan baik. Artinya mereka hadir dalam kegiatan *workshop* online tapi tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi pada bulan Desember 2024, ketika melaksanakan uji kompetensi kepada pranata humas di salah satu Kementerian. Pada saat itu, asesi menjelaskan ketidak siapannya dalam mengikuti uji kompetensi akibat tidak sepenuhnya hadir dalam *workshop* sehingga asesi salah dalam memilih skema, yang berakhir pada kesalahan dalam mengumpulkan data – data yang dipersiapkan. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa mengikuti kegiatan *workshop* dengan baik menentukan keberhasilan seseorang dalam uji kompetensi.

Gambar 1

Diagram alur kegiatan pembuatan materi dan kegiatan workshop



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pelaksana PKM melakukan koordinasi dengan pimpinan LSPPRI, Muslim Basya, untuk mengetahui gambaran umum dari pelaksanaan workshop. Pimpinan LSPPRI menjelaskan bahwa kegiatan *workshop* dilaksanakan pada 31 Januari 2025, dimana uji kompetensi dilaksanakan 13 Februari 2025. *Workshop* diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait pelaksanaan uji kompetensi sehingga para calon peserta dapat mempersiapkan diri.



Poin-poin terkait kegiatan uji kompetensi sebagai berikut :

- 1) Bahan perlu menjelaskan legalitas LSPPRI sebagai penyelenggara uji kompetensi PR atas nama BNSP;
- 2) Materi perlu menjelaskan skema-skema beserta persyaratannya yang bisa dipilih oleh peserta *workshop*; dan
- 3) Pemateri menjelaskan metode uji kompetensi untuk menilai kompetensi kerja mereka, yang terdiri dari uji tertulis, wawancara, praktek dan bukti cetak portofolio pekerjaan. Para peserta *workshop* adalah para profesional PR yang terhimpun dalam Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN). *Workshop* ini diselenggarakan oleh LSPPRI, bekerjasama dengan FH BUMN.

Penyesuaian materi

Dilakukan setelah materi dibuat oleh ketua PKM di kombinasikan dengan menggunakan bahan-bahan yang pernah diberikan oleh pimpinan LSPPRI. Ketua PKM menyerahkan materi untuk kegiatan *workshop* kepada pimpinan LSPPRI, agar materi yang disampaikan sesuai dengan keinginannya. Pimpinan LSPPRI menyetujui terkait isi materi sehingga materi sudah bisa dipaparkan.

Pemaparan materi

Materi yang disampaikan dalam kegiatan *workshop* yang dimulai pada tanggal 31 Januari 2025, pada jam 15.00-17.00, secara daring. Materi yang disampaikan oleh ketua PKM, selaku pemateri, adalah terkait legalitas LSPPRI sebagai penyelenggara uji kompetensi PR atas nama BNSP, Menjelaskan 17 skema-skema uji kompetensi beserta unit kompetensinya, dan kegiatan uji kompetensinya yang dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis, wawancara, portofolio dan praktek. Materi dipaparkan selama satu setengah jam.

Tanya jawab diberikan kepada peserta *workshop* agar tercapainya pemahaman atas isi materi yang di berikan. Proses tanya jawab dilakukan selama tiga puluh menit. Beberapa peserta bertanya terkait pelaksanaan uji kompetensi. Terdapat satu peserta bertanya secara langsung terkait isi materi. Sedangkan peserta lain, bertanya melalui kolom chat karena microphone laptopnya rusak. Handoko bertanya secara langsung terkait dua hal yaitu apa saja syarat untuk memperpanjang sertifikat profesi yang lama untuk skema manager PR? Saat itu Pemateri menjelaskan jika skema manager PR diambil sebelum SKKNI No 32 tahun 2022, maka ia harus mengambil dari awal kembali karena unit-unit kompetensi untuk skema Manager PR mengalami perubahan sejak munculnya SKKNI No. 32, tahun 2022 sehingga pemegang sertifikat tidak bisa memperpanjang tetapi perlu mengambil dari awal.

25 Peserta mengikuti uji kompetensi PR pada tanggal 13 Februari 2025. Menurut panitia uji kompetensi dari LSPPRI, para peserta yang mendapatkan nilai K (kompeten) mencapai 95%. Hal ini menjadi pengukuran kedua bahwa keterlibatan tim PKM Untar dalam kegiatan *workshop*, berhasil membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkualitas sehingga mereka sukses dalam kegiatan uji kompetensi bertaraf nasional karena diakui oleh negara.



Gambar 2

Salah satu peserta (priyanka) bertanya melalui kolom chat di zoom



Gambar 3

Tim pkm untar memberikan jawaban atas pertanyaan peserta di zoom



Gambar 4

Acara workshop daring dibuka oleh direktur manajemen risiko dan legal, perum perumnas, ir nixon sitorus





4. KESIMPULAN

PKM Untar berhasil dalam mendukung kegiatan *workshop* yang diselenggarakan oleh LSPPRI bersama FH BUMN. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pengertian para peserta *workshop* yang mendapatkan informasi yang berkualitas dari Tim PKM Untar. Hal ini terbukti dalam proses tanya jawab, dimana para peserta aktif bertanya kepada ketua PKM, selaku pematari, kemudian mereka berterima kasih karena telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Keberhasilan kedua terbukti dari jumlah peserta yang mendapatkan nilai kompeten dari Asesor setelah mengikuti uji kompetensi, mencapai 95%. Hal ini menunjukkan target keberhasilan peserta dalam uji kompetensi sebesar 95 % mendapatkan nilai K, berhasil tercapai.

Kegiatan PKM perlu didukung terus oleh Universitas Tarumanagara karena peran perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dan pemerintah. Seperti kegiatan *workshop* persiapan uji kompetensi PR yang dilakukan oleh Tim PKM Untar adalah untuk membantu peserta *workshop* dalam mengikuti uji kompetensi PR atas nama BNSP. Para peserta *workshop* berhasil mencapai nilai kompeten (K), saat mengikuti uji kompetensi PR, yang dilaksanakan 13 Februari 2025

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim PKM Untar mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Universitas Tarumanagara yang telah membantu keuangan dan kesempatan kepada anggota tim yang terdiri dari para dosen dan mahasiswa/wi Untar sehingga kami dapat menerapkan ilmu yang dimiliki untuk memberikan kiprah kami dalam membantu memecahkan masalah komunikasi di masyarakat terkait uji kompetensi public relations atas nama BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dengan memberikan informasi yang berkualitas agar mereka memperoleh sertifikat profesi PR yang diakui oleh negara.

REFERENSI

- Christofer, D., & Pribadi, M. A. (2021). Interaksi simbolik dalam word of mouth untuk mengenalkan iPhone di kalangan persahabatan (Studi etnografi teori peran pengambilan keputusan dalam lingkungan persahabatan). *Jurnal Prologia*, 5(1), 15–20. <https://doi.org/10.24912/pr.v5i1.8075>
- Halim, R. A., & Pribadi, M. A. (2024). Interaksi simbolik pada host livestreamer di TikTok @Luunashop. *Jurnal Koneksi*, 8(2), 276–285. <https://doi.org/10.24912/kn.v8i2.27528>
- Hardianto, A., & Pribadi, M. A. (2024). Interaksi simbolik dalam perencanaan komunikasi politik @puterikomarudin melalui Instagram. *Jurnal Koneksi*, 8(1), 83–91. <https://doi.org/10.24912/kn.v8i1.27560>
- LSPPRI. (2025). About us [Kolom menu]. LSPPRI. <https://lspri.or.id/about-us/>
- Martin, H., & Pribadi, M. A. (2023). Interaksi simbolik kegiatan reses di wilayah Dapil 1 Tangerang Kota. *Jurnal Koneksi*, 7(2), 289–297. <https://doi.org/10.24912/kn.v7i2.21367>
- Natalia, M., & Sukendro, G. G. (2024). Ungkapan komunikasi pengendara motor Vespa klasik untuk memperkuat solidaritas. *Jurnal Koneksi*, 8(2), 399–406. <https://doi.org/10.24912/kn.v8i2.27627>
- Prasetyo, A. (2023). Pengelolaan lembaga sertifikasi profesi (LSP-P1) dalam menyiapkan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 59–72. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.177>
- Puspitasari, I., & Azeharie, S. (2019). Interaksi simbolik pengajar musik tunanetra dengan siswa tunanetra di Yayasan Mitra Netra Lebak Bulus Jakarta Selatan. *Jurnal Koneksi*, 3(1), 288–294. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6230>



- Rianto, B., Jalil, M., Chrismondari, M., Muni, A., & Sudeska, E. (2023). Pelatihan dan sosialisasi uji sertifikasi kompetensi teknis BNSP sebagai sarana peningkatan kompetensi keahlian. *LANDMARK: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 59–64. <https://doi.org/10.32520/landmark.v1i2.2663>
- Sani, A. F. I. (2018, December 20). Sertifikasi keahlian dilakukan besar-besaran pada 2019. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.com>
- Silenzie, R., & Pribadi, M. A. (2020). Interaksi simbolik dalam komunikasi pemasaran terpadu di PT. Creative Motion Pictures: Studi kasus komunikasi pemasaran film Once Upon a Time in Indonesia. *Jurnal Koneksi*, 4(2), 310–315. <https://doi.org/10.24912/pr.v4i2.6514>
- Slamet, M. (2021). Manajemen uji kompetensi lembaga sertifikasi profesi (LSP) SMK Negeri 1 Kebumen. *Media Manajemen Pendidikan*, 4(2), 203–213. <https://doi.org/10.30738/mmp.v4i2.8640>
- Stevanny, M., & Pribadi, M. A. (2020). Interaksi simbolik dan ekologi media dalam proses keterlibatan sebagai roleplayer. *Jurnal Koneksi*, 4(1), 36–42. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6505>
- Sugiarto, J. L., & Pribadi, M. A. (2022). Interaksi simbolik dalam perencanaan komunikasi pemasaran Ben Gong's Tea selama Covid-19. *Jurnal Prologia*, 6(1), 12–16. <https://doi.org/10.24912/pr.v6i1.10254>